

KEPUTUSAN
KEPALA DESA DRADAHBLUMBANG
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013



DESA DRADAHBLUMBANG
TAHUN 2013



**KECAMATAN KEDUNGPRING
PEMERINTAH DESA DRADAHBLUMBANG**

PERATURAN DESA DRADAHBLUMBANG KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRADAHBLUMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DRADAHBLUMBANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 17. Peraturan Desa Dradahblumbang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DRADAHBLUMBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRADAHBLUMBANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.1.317.011.976 (Satu Milyad tiga ratus tujuh belas juta sebelas ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupia).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|------------------|
| a. Pendapatan | Rp.1.317.011.976 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 914.027.976 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 402.984.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 21.248.000 |
| 2) Pengeluaran | Rp. 20.000.000 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dradahblumbang

Pada tanggal 6 Juni 2013

KEPALA DESA DRADAHBLUMBANG



KARI MUJI SANTOSO

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA DRADAHBLUMBANG KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	384,853,900	384,853,900	
1.1.1.1	Hasil Usaha Desa LPMD	12,840,000	12,840,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Desa BUMD	95,762,900	95,762,900	
1.1.1.3	Hasil Usaha Desa UED-SP	97,924,400	97,924,400	
1.1.1.4	Hasil Usaha Desa Simpan Pinjam UP2K	6,960,000	6,960,000	
1.1.1.5	Hasil Usaha UPKu	75,129,600	75,129,600	
1.1.1.6	Iuran Pelayanan air Minum (HIPPAM)	91,602,000	91,602,000	
1.1.1.7	Iuran Pelayanan air irigasi (HIPPA)	4,635,000	4,635,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	89,225,000	178,500,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	87,225,000	151,500,000	
1.1.2.1.1	Tanah Kas Desa	1,500,000	1,500,000	
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok Kades	18,000,000	18,000,000	
1.1.2.1.3	Tanah Bengkok Perangkat Desa	56,725,000	120,000,000	
1.1.2.1.4	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	11,000,000	12,000,000	
1.1.2.2	Pasar Desa	2,000,000	27,000,000	
1.1.2.2.1	Pasar Desa	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.2.2	Kios Depan Gudang Garam	-	25,000,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	168,729,300	174,404,500	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat Desa (PHBN)	4,720,000	9,500,000	
1.1.3.2	Swadaya Masyarakat Dusun Blumbang	5,579,800	6,475,000	
1.1.3.3	Swadaya Masyarakat Dusun Carangbang	90,271,000	90,271,000	
1.1.3.4	Swadaya Masyarakat Dusun Dradah	28,612,000	28,612,000	
1.1.3.5	Swadaya Masyarakat Dusun Tarik	11,334,500	11,334,500	
1.1.3.6	Swadaya Masyarakat Dusun Sempu	28,212,000	28,212,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	33,500,000	36,000,000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	25,000,000	27,000,000	
1.1.4.2	Partisipasi Masyarakat	8,500,000	9,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	22,635,000	22,735,000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	7,805,000	7,805,000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	1,400,000	1,400,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	530,000	530,000	
1.1.5.4	Hasil dari Jasa Listrik	1,000,000	1,000,000	
1.1.5.5	Hasil Penjualan mangga	400,000	500,000	
1.1.5.6	Kontribusi dari BUMD	600,000	600,000	
1.1.5.7	Kontribusi dari UED-SP	600,000	600,000	
1.1.5.8	Kontribusi dari HIPPA	600,000	600,000	
1.1.5.9	Kontribusi dari HIPPAM	600,000	600,000	
1.1.5.10	Kontribusi dari PT Gudang Garam	2,000,000	2,000,000	
1.1.5.11	Kontribusi dari KBP	1,500,000	1,500,000	
1.1.5.12	Kontribusi dari Tower jaringan Telkomsel	1,500,000	1,500,000	
1.1.5.13	Kontribusi dari Tower jaringan Indosat	1,500,000	1,500,000	
1.1.5.14	Kontribusi LMDH	2,000,000	2,000,000	
1.1.5.15	Kontribusi dari Rest Area	600,000	600,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	10,220,576	10,220,576	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	4,900,000	4,900,000	
1.2.2.2	Upah Pungut PBB	5,320,576	5,320,576	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	79,000,000	79,000,000	
1.4.1	ADD	51,500,000	51,500,000	
1.4.2	BANSUN	27,500,000	27,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80,400,000	116,300,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,000,000	10,200,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	66,000,000	78,000,000	
1.5.3.3	TPBPD	4,400,000	5,600,000	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.5	Puma Bakti Kepala Desa	-	5,000,000	
1.5.3.6	Bantuan RT	-	10,000,000	
1.5.3.6	Bantuan Pilkades	-	6,500,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	100,000,000	
	Pembangunan PNPM-MPd	-	100,000,000	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	100,000,000	
	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan	-	100,000,000	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	40,000,000	30,000,000	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan	40,000,000	30,000,000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	4,720,000	84,998,000	
1.7.1	Bantuan biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		75,593,000	
1.7.2	Sumbangan dari para pengusaha	4,720,000	9,405,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	913,283,776	1,317,011,976	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	689,788,776	914,027,976	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	131,537,716	173,912,716	
2.1.1.1	Honorarium pegawai	95,625,000	138,000,000	
2.1.1.2	Honorarium TIMLAK	400,000	400,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	2,650,000	2,650,000	
2.1.1.4	Honorarium Upah pungut PBB	5,329,576	5,329,576	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	3,000,000	3,000,000	
2.1.1.6	Honorarium Pengurus HIPPA	10,438,140	10,438,140	
2.1.1.7	Honorarium Pengurus HIPPA	1,720,000	1,720,000	
2.1.1.8	Horarium Karyawan Koperasi BUMD	4,950,000	4,950,000	
2.1.1.9	Honorarium Karyawan Koperasi UED-SP	7,425,000	7,425,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	4,500,000	5,700,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,200,000	2,400,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	3,300,000	3,300,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	213,966,300	394,630,500	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	6,327,000	6,327,000	
2.1.2.2.2	Belanja Meja Tulis 2 buah	2,200,000	2,200,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1,400,000	1,400,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	960,000	960,000	
2.1.2.2.5	Pembuatan Peraturan Desa	800,000	1,000,000	
2.1.2.2.6	Belanja Tenaga Gotong Royong	25,000,000	28,291,300	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	36,050,000	36,050,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	27,500,000	27,500,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material PNPM	-	100,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan.	40,000,000	130,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja Kamera Digital	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.13	Belanja Pemeliharaan/keamanan Pasar Desa	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.14	Belanja Material Pembangunan Kios	-	25,000,000	
2.1.2.2.15	Belanja Material dari swadaya Masyarakat	68,729,300	30,902,200	
2.1.3	Belanja Modal	339,784,760	339,784,760	
2.1.3.1	Belanja Modal Koperasi BUMD	88,741,900	88,741,900	
2.1.3.2	Belanja Modal LPMD	12,840,000	12,840,000	
2.1.3.3	Belanja Modal UP2K	6,970,000	6,970,000	
2.1.3.4	Belanja Modal Koperasi UED-SP	90,499,400	90,499,400	
2.1.3.5	Belanja Modal UPKu	72,502,350	72,502,350	
2.1.3.6	Belanja Modal HIPPA	65,316,670	65,316,670	
2.1.3.7	Belanja Modal HIPPA	2,914,440	2,914,440	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	232,495,000	402,984,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Tetap	161,125,000	254,800,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	22,000,000	29,200,000	
2.2.1.1.1	Hasil Bengkok Kades	12,000,000	18,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	9,000,000	10,200,000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes	11,000,000	12,000,000	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	122,725,000	208,000,000	
2.2.1.3.1	Hasil Bengkok Perangkat Desa Lainnya	56,725,000	120,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	66,000,000	78,000,000	
2.2.1.3.3	Asuransi Perangkat Desa	-	10,000,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	5,400,000	5,600,000	
2.2.1.4.1	Representatif BPD	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.4.2	TPBPD	4,400,000	5,600,000	
2.2.2	Belanja Hibah	40,000,000	30,000,000	
2.2.2.1	Belanja Material Jalan Poros	40,000,000	30,000,000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	14,920,000	19,641,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN	4,420,000	9,141,000	
2.2.3.3	Kegiatan PHBI	8,500,000	8,500,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	1,000,000	1,000,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	15,950,000	98,043,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	4,500,000	4,500,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	3,450,000	3,450,000	
2.2.4.3	Operasional LPM	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.5	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.6	Operasional PJOK/PJAK	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.9	Operasional Pilkades	-	82,093,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	500,000	500,000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	500,000	500,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	922,283,776	1,317,011,976	
3	Pembiayaan	2,102,000	21,248,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	2,102,000	21,248,000	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	2,102,000	1,248,000	
3.1.2	Penerimaan Pinjaman	-	20,000,000	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	20,000,000	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	20,000,000	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	2,102,000	1,248,000	

Ditetapkan di Dradahblumbang
Pada tanggal 6 Juni 2013

KEPALA DESA DRADAHBLUMBANG
KARI MUJI SANTOSO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DRADAHBLUMBANG KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRADAHBLUMBANG KECAMATAKEDUNGPRING.
NOMOR : 188/ /413.312.3.1 /2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA DRADAHBLUMBANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRADAHBLUMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRADAHBLUMBANG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Dradahblumbang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Dradahblumbang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Dradahblumbang membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRADAHBLUMBANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dradahblumbang
Pada tanggal 10 Juni 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DRADAHBLUMBANG**



Ketua

Drs. SHODIKIN M.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DRADAHBLUMBANG KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA DRADAHBLUMBANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRADAHBLUMBANG KEC.
KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 4 / 413.312.3.1 / 2013

Pada hari ini Senin tanggal 10 bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga belas, bertempat di Balai Desa Dradahblumbang Kecamatan Kecamatan Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Dradahblumbang perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Dradahblumbang mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Dradahblumbang menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa
Dradahblumbang**

Tanda Tangan:

1. Drs. Shodikin, M.Pd.
Ketua

2. Ngatemin, S.Pd.
Wakil Ketua

3. Khaidhir S.Kep.Ns.
Sekretaris

4. Hartono
Bendahara

5. M. Romli
Anggota

6. Mujihari
Anggota

7. Abdul Halim, S.T.
Anggota

8. Sumijan
Anggota

9. Jatmiko
Anggota

10. Drs. Marji
Anggota

11. Kusman
Anggota